



PIMPINAN DPRD KABUPATEN PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 171.1/Kep. 27 -DPRD/2019

LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka pada tanggal 22 Nopember 2019 dilaksanakan Rapat Paripurna DPRD pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020;
- b. bahwa dengan telah disetujui Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dalam Rapat Paripurna DPRD, maka untuk tertib hukum dan tertib administrasi perlu dituangkan dalam bentuk Keputusan DPRD Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota (LNRI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005, tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020;
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Pemerintah Daerah dapat mengajukan rancangan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal, 22 Nopember 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA  
KETUA,

ttd

H. AHMAD SANUSI

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
2. Yth. Kepala Badan Koordinasi Pembangunan dan Pemerintahan Daerah di Purwakarta.

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Purwakarta.  
Nomor : 171.1/Kep. 27 -DPRD/2019  
Tanggal : 22 Nopember 2019  
Tentang : Program Pembentukan Peraturan  
Daerah Kabupaten Purwakarta  
Tahun 2020.

---

## DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2020

### I. PENDAHULUAN.

Bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagai bagian dari pembangunan hukum adalah merupakan instrumen perencanaan program pembentukan hukum daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis. Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 memuat daftar rancangan Peraturan Daerah yang ingin diwujudkan pada tahun 2020. Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2020 merupakan salah satu sarana guna mewujudkan visi dan misi Kabupaten Purwakarta, yaitu cerminan dari upaya membangun kekuatan hukum yang memberikan perlindungan menyeluruh terhadap masyarakat dengan berorientasi pada produk hukum yang cerdas tanggap terhadap perubahan dan berkembang sesuai dengan dinamika yang terjadi di masyarakat

Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 ini merupakan wujud dari perencanaan pembentukan peraturan daerah yang materinya bersumber dari Program Pembentukan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta yang dihimpun atas dasar kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pada tahun 2020 perencanaan pembentukan peraturan daerah diharapkan dapat dijadikan dasar oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam melaksanakan program pembangunan baik yang bersipat fisik maupun non fisik dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah tahun 2020 telah mencakup beberapa urusan pemerintahan daerah Kabupaten Purwakarta dibidang Kesehatan, lingkungan hidup, ekonomi , perhubungan dan bidang urusan lainnya sebagai tindak lanjut amanat peraturan perundang-undangan maupun penyesuaian dengan perkembangan keadaan.

Hal tersebut merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005, tentang Tatacara Pembentukan Peraturan Daerah.

### II. MAKSUD DAN TUJUAN.

#### A. Maksud :

1. Memberikan gambaran objektif tentang kondisi umum dibidang peraturan perundang-undangan di Kabupaten Purwakarta.

2. Menyusun skala prioritas penyusunan rancangan peraturan daerah, sebagai suatu program yang berkesinambungan yang terpadu sebagai pedoman bersama dalam pembentukan perundang-undangan di Kabupaten Purwakarta.
3. Menyelenggarakan sinergi antara unit kerja yang berwenang membentuk Perundang-undangan di Kabupaten Purwakarta.

B. Tujuan :

1. Mempercepat proses pembentukan peraturan perundang-undangan tahun 2020 di Kabupaten Purwakarta dalam rangka melaksanakan kebijakan daerah.
2. Mendukung upaya penyempurnaan peraturan daerah yang sudah ada namun tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.
3. Membentuk peraturan daerah yang baru yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### III. DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2020

Daftar rancangan peraturan daerah pada Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Daftar Raperda yang berasal dari DPRD:

| No | Judul Rancangan Peraturan Daerah                                                                                                         | Keterangan             |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1  | Raperda Tentang Penanaman Modal;                                                                                                         | Usulan dari komisi I   |
| 2  | Raperda Tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;                                                                                    | Usulan dari Komisi II  |
| 3  | Raperda Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan;                                                 | Usulan dari Komisi II  |
| 4  | Raperda Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir;                                                           | Usulan dari Komisi III |
| 5  | Raperda Tentang Pondok Pesantren;                                                                                                        | Usulan dari Komisi IV  |
| 6  | Raperda Tentang Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal;                          | Usulan dari Komisi IV  |
| 7  | Raperda Tentang Desa                                                                                                                     | Luncuran tahun 2019    |
| 8  | Raperda Tentang Perubahan atas Perda Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir. | Usulan dari Komisi II  |

Daftar Raperda Kumulatif terbuka

| No | Judul Rancangan Peraturan Daerah                                                                           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; |
| 2  | Raperda Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;                      |
| 3  | Raperda Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;                                |

Daftar Rancangan Peraturan Daerah dari Pemerintah Daerah

| No | Jadwal Rancangan Peraturan Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Keterangan          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1  | Raperda Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta                                                                                                                                                                                                                                                      | Baru                |
| 2  | Raperda Tentang Kota Layak Anak;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Baru                |
| 3  | Raperda Tentang Penanggulangan HIV-AIDS dan Tuberkolosis;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Baru                |
| 4  | Raperda Tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Purwakarta Kabupaten Purwakarta                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Baru                |
| 5  | Raperda Tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Baru                |
| 6  | Raperda Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, Pertamanan dan Pemakaman;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Baru                |
| 7  | Raperda Tentang Penyelenggaraan Kearsipan;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Luncuran tahun 2015 |
| 8  | Raperda Tentang Perubahan Atas Perda Nomor.9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta                                                                                                                                                                                                                                                                   | Baru                |
| 9  | Raperda Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh;                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Baru                |
| 10 | Raperda Tentang Rencana Induk Sistem Pengendalian Air Minum;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Baru                |
| 11 | Raperda Tentang Perubahan Atas Perda No.11 Tahun 2012 Tentang RTRW Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2021;                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Luncuran Tahun 2017 |
| 12 | Raperda Tentang RDTR dan Penentuan Zonasi di Beberapa Wilayah Kabupaten Purwakarta :<br>a. Kawasan Perkotaan Purwakarta<br>b. Kawasan Perkotaan Wanayasa<br>c. Kawasan Perkotaan Campaka<br>d. Kawasan Perkotaan Babakancikao<br>e. Kawasan Perkotaan Pasawahan<br>f. Kawasan Perkotaan Bungursari<br>g. Kawasan Perkotaan Maniis (Waduk Cirata)<br>h. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Sadang | Baru                |
| 13 | Raperda Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2019 Tentang RPJMD Tahun 2018-2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Baru                |

#### IV. PENUTUP.

Keberhasilan pelaksanaan Propemperda ditentukan oleh persiapan-persiapan baik yang bersifat administratif, maupun penelitian, pengkajian yang komprehensif dan mendalam serta terbukanya kesempatan bagi masyarakat luas untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pembentukan peraturan daerah.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA  
KETUA,

ttd

H. AHMAD SANUSI